

RENCANA KERJA TAHUN 2021

APIP



INSPEKTORAT DAERAH
KOTA BATAM

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU.	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat 2019 dan Capaian Renstra Inspektorat	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Batam...	II-6
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Batam.....	II-7
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-8
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-11
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	III-1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah	III-4
3.3 Program dan Kegiatan	III-5
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BATAM.....	IV-1
BAB VI PENUTUP	VI-1

Lampiran: Pemetaan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya, sehingga Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2021 telah selesai disusun.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dibuat merupakan amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang diharuskan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja secara sistematis terarah, terpadu yang berpedoman pada RPJMD Tahun 2016-2021.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus melakukan pemetaan program dan kegiatan untuk rencana kerja di tahun 2021.

Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Renstra Inspektorat dan RPJMD Kota Batam sesuai dengan tupoksi yang merupakan sebuah rangkaian kewenangan yang disusun dalam Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2021 ini sangat penting bagi Pemerintah Kota Batam yang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan Program Kegiatan, maka proses penyusunan dilakukan secara sistematis yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif artinya bahwa informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam Dokumen Renstra yang merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel.

Akhirnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pembuatan penyusunan Rencana Kerja ini.

Batam, Juli 2020
INSPEKTUR DAERAH KOTA BATAM



HENDRIANA GUSTINI, S.Sos
NIP.19680824 199008 2 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Kota Batam adalah Inspektorat Daerah yang bertugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Inspektorat Daerah.

Sesuai Peraturan Daerah tersebut kedudukan Inspektorat Daerah Kota Batam adalah unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Batam dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kota Batam.

Inspektorat Daerah Kota Batam merupakan institusi pemeriksa internal yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Batam lebih bersifat pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Batam demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Untuk mewujudkan fungsi pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah maka ditetapkan rencana akhir rencana kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2021. Rencana kerja adalah bagian dari kerangka Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kota Batam dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis untuk 1 (satu) tahun. Rencana Kinerja merupakan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan selama satu tahun anggaran dan menjadi komitmen yang harus dilaksanakan oleh setiap aparatur Inspektorat Daerah Kota Batam dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran strategik yang ditetapkan berisikan indikator pencapaian sasaran dari suatu program dan kebijakan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 -2025.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem dan Informasi Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025.
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam

- (RPJMD) 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8).
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 13. Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam.
 14. Peraturan Walikota Batam Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Kota Batam.
 15. Peraturan Walikota Batam Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
 16. Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 69-1/HK/1/2017 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah (Renstra PD) Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan sebagaimana a telah ditargetkan dalam perencanaan lima tahunan yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Kota Batam.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Kota Batam ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran tentang kondisi umum, evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Kota Batam di tahun 2021;
2. Memberikan acuan, tolok ukur dan instrumen bagi Inspektorat Daerah Kota Batam dalam pelaksanaan kegiatan tahunan sehingga terarah dan dapat mencapai sasaran dengan hasil maksimal;
3. Memberi arahan keterkaitan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan yang dilaksanakan Inspektorat Kota Batam agar sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Inspektorat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Inspektorat Daerah, proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah, keterkaitan antara Renja Inspektorat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Inspektorat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Inspektorat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Inspektorat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat 2019 dan Capaian Renstra Inspektorat Kota Batam.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Inspektorat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat

Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Inspektorat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Inspektorat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Inspektorat Daerah yang bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Batam.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Batam.

Berisikan uraian mengenai Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada sub bab ini menguraikan tentang usulan program dan kegiatan di rancangan awal RKPD yang di sesuaikan dengan kebutuhan Inspektorat daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan diperoleh, kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berisi tentang penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi Inspektorat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2019 dan Capaian Renstra Inspektorat

Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi Rencana Strategis Tahun 2016-2021 ditetapkan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, serta pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran, yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja. Penetapan indikator kinerja kegiatan berdasarkan pada kelompok masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan pembangunan Inspektorat Kota Batam tahun 2016-2021, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dan tahun 2020 dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja tahun 2019 dan tahun 2020. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana kerja adalah mencakup pelaksanaan 4 (empat) kegiatan teknis DPA-SKPD dan 2 (dua) kegiatan rutin (EX BAU) sebagai kegiatan pendukung.

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2019, telah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Inspektorat Kota Batam, dalam APBD Kota Batam tahun 2019 sebesar Rp.3.261.292.388,18 (tiga milyar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh delapan koma delapan belas rupiah). Pada APBD Perubahan sebesar Rp.2.533.684.340,18 (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh koma delapan belas rupiah) dengan realisasi sebesar Rp2.218.344.633,- (dua milyar dua ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) atau 84.34%.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - a. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Indikator kinerja : Tersedianya sarana dan prasarana administrasi perkantoran

Realisasi capaian anggaran dan kinerja sebagai berikut :

 - Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 1.375.367.827,00,- dan realisasi keuangan pada tahun 2018 sebesar Rp 1.112.518.219,00,- atau 80.89%.
 - Capaian Indikator Kinerja 100% dari target 100%.
 - Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp969.310.472.18,00,- dan realisasi keuangan pada tahun 2019 sebesar Rp824.386.244,00 atau 85.05%.
 - Capaian Indikator Kinerja 100% dari target 100%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Indikator kinerja : Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

Realisasi capaian anggaran dan kinerja sebagai berikut :

 - Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 105.075.000,00,- dan realisasi keuangan pada tahun 2018 sebesar Rp 81.460.000,00,- atau 77.53%.
 - Capaian Indikator Kinerja 100% dari target 100%
 - Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp539.393.868,00 dan realisasi keuangan pada tahun 2019 sebesar Rp 521.527.268,00 atau 96.69%.
 - Capaian Indikator Kinerja 100% dari target 100%
3. Program Penataan dan penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
 - a. Kegiatan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

Indikator kinerja : LHP Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Realisasi capaian anggaran dan kinerja sebagai berikut :

 - Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 442.107.200,00,- dan realisasi keuangan pada tahun 2018 sebesar Rp 290.625.619,00,- atau 65.74%.
 - Capaian Indikator Kinerja 100% dari target 100%
 - Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp306.940.000,00 dan realisasi keuangan pada tahun 2019 sebesar Rp269.638.000,00 atau 87.85%.
 - Capaian Indikator Kinerja 100% dari target 100%

b. Kegiatan Pelaksanaan Reviu di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

Indikator kinerja : 20 Objek Reviu dan 1 Laporan LK

Realisasi capaian anggaran dan kinerja sebagai berikut :

- Tahun 2018 tidak dianggarkan
- Tahun 2019 dianggarkan sebesar 150.600.000,00 dan realisasi keuangan pada tahun 2019 sebesar Rp144.653.000,00 atau 96,05%.
- Capaian Indikator Kinerja 20 Objek Reviu dan 1 Laporan LK dari target 20 Objek Reviu dan 1 Laporan LK

c. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi SPIP

Indikator kinerja : Laporan pelaksanaan monev SPIP

Realisasi capaian anggaran dan kinerja sebagai berikut :

- Tahun 2018 tidak dianggarkan.
- Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp80.100.000,00 dan realisasi keuangan pada tahun 2019 sebesar Rp79.230.000,00 atau 96.05%.
- Capaian Indikator Kinerja 100% dari target 100%

d. Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP

Indikator kinerja : Laporan pelaksanaan kegiatan kapabilitas APIP

Realisasi capaian anggaran dan kinerja sebagai berikut :

- Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 297.120.349,00,- dan realisasi keuangan pada tahun 2018 sebesar Rp 272.970.349,00,- atau 91.87%.
- Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp487.340.000,00 dan realisasi keuangan pada tahun 2019 sebesar Rp 378.910.121,00 atau 77.75%.
- Capaian Indikator Kinerja 100% dari target 100%

Rekapitulasi Evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan diarahkan terhadap indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari: input, output dan outcome. Hasil evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan capaian kinerja dari sebagian besar kegiatan .

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kota Batam Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing- masing indikator kinerja sasaran. Tingkat

capaian kinerja masing-masing indikator tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kota Batam

Kode	Utusan/Bidang/Usus/Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = (7/6))	(9)	(10 (5+7+9))	(11 = (10/4))
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar									
	Bidang/Urusan Pengawasan									
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam	100%	100%	100%	85.05%	85.05%	100%	100%	100%
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi perkantoran	100%	100%	100%	85.05%	85.05%	100%	100%	100%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah	60%	0	100%	96.69%	96.69%	100%	55%	100%
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	0	100%	100%	100%	-	-	-
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	100%	0	-	-	-	100%	100%	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	0	-	-	-	100%	100%	100%
	Program Penataan dan Penempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal	95%	90%	91%	91%	100%	93%	79%	83%
	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	LHP Pemeriksaan dengan tujuan tertentu	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0
	Program Penataan dan Penempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Meningkatnya kepatuhan terhadap standard an prosedur pertanggungjawaban keuangan	62%	50%	54%	54%	100%	58%	58%	58%
	Pelaksanaan Reviu dilingkungan Pemko Batam	Laporan Hasil Reviu	20 Objek Reviu dan 1 Laporan LK	20 Objek Reviu dan 1 Laporan LK	20 Objek Reviu dan 1 Laporan LK	20 Objek Reviu dan 1 Laporan LK	100%	20 Objek Reviu dan 1 Laporan LK	6 Objek Reviu dan 1 Laporan LK	30%
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi SPIP	Laporan pelaksanaan monev SPIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0%
	Peningkatan Kapabilitas APJP	Laporan pelaksanaan kegiatan kapabilitas APJP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Batam

Pelaksanaan kebijakan strategis pemberantasan korupsi didasarkan pada amanat Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 -2025. Berdasarkan peraturan tersebut, tugas Pemerintah Daerah yang pertama adalah menjabarkan dan melaksanakan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) melalui aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan setiap tahun. Tugas Pemerintah Daerah yang kedua, adalah menyampaikan laporan pencapaian pelaksanaan aksi PPK sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional.

Indikator kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kota Batam sebagaimana tertuang dalam Renstra Inspektorat Kota Batam Tahun 2016-2021 ada 6 (enam) indikator sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah :

Tabel T-C.30.
Capaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kota Batam

NO	Indikator Sasaran	SPM/ NSPK	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatkan kualitas SPIP OPD	-	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level berkembang.	25%	50%	100%	100%	27%	50%	100%	100%	
2	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	-	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD	-	Rata rata nilai hasil Evaluasi SAKIP OPD	B	B	BB	A	B	B	BB	A	
4	Meningkatkan kepatuhan OPD terhadap peraturan perundang –undangan.	-	Persentase OPD yang tidak ada temuan material (Aset dan Keuangan)	55%	60%	65%	85%	79%	80%	80%	80%	
			Persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan (Internal dan Eksternal) yang ditindak lanjuti	91%	93%	95%	95%	97%	97%	97%	97%	
5	Meningkatkan kualitas SDM Inspektorat	-	Persentase jumlah pegawai bersertifikasi fungsional dan teknis. - Fungsional - Teknis	45% 10 org	55% 10 org	60% 10 orang	65% 10 orang	60% 15 org	60% 15 org	65% 25 org	75% 30 org	
6	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat	-	Kapabilitas Inspektorat	3	3	3	3	3	3	3	3	

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan indikator sasaran organisasi, yaitu :

a. Faktor Pendorong :

- Adanya Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan dengan baik.

- Mekanisme kerja Inspektorat Kota Batam yang berorientasi kepada pencapaian kinerja.
- Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Inspektorat Kota Batam dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
- Adanya kerjasama yang baik dari perangkat daerah terhadap upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan.
- Pola kerja yang sistemik dan terjadwal yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

b. Faktor Penghambat :

- Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibandingkan dengan jumlah objek yang diperiksa.
- Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan.
- Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan Perangkat Daerah masih belum optimal.
- Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Perangkat Daerah

Adapun isu-isu strategis yang diangkat dalam rangka penyelenggaraan tugas Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2016 – 2021:

- a. Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Batam secara keseluruhan sudah mulai berjalan dengan baik, walaupun tantangan kedepan terhadap SAKIP Kota Batam masih harus berbenah untuk dapat meningkatkan nilai.
- c. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI maupun APIP kedepan diperkirakan akan berjalan dengan baik dengan adanya Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah.
- d. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dapat dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan

mengedepankan peran sebagai *quality assurance* (menjamin kualitas dari suatu instansi).

- e. Meningkatkan Kapabilitas APIP dengan tetap mengedepankan profesionalisme APIP sebagai *quality assurance*.
- f. Masih kurangnya SDM di lingkungan Inspektorat.
- g. Masih perlunya pelatihan dan pendidikan bagi Tenaga Fungsional Auditor, P2UPD dan struktural.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan awal RKPD

Dalam rancangan RKPD tahun 2021 kegiatan Inspektorat Daerah terdiri dari 3 (tiga) program dan 13 (tiga belas) kegiatan. Secara rinci perubahan RKPD menjadi Rencana Kerja Inspektorat Daerah tahun 2021 terlihat pada Tabel Review Rancangan RKPD menjadi Renja Inspektorat Daerah tahun 2021.

Adapun proses review RKPD awal dilakukan dengan penjarangan kegiatan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Daerah sebagai dasar dari penyusunan Renja selain dari RKPD awal 2021 ditambah dengan kegiatan yang dikategorikan mendesak dan sangat urgen untuk dimasukkan ke dalam Renja 2021. Berikut Tabel Review Awal RKPD dan hasil pembahasan di bawah ini.

Tabel T-C 31
Review terhadap Rancangan Awal RKP
Inspektorat Daerah Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kota Batam

Lembar 1 dari 1

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD			Program Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD			
I	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Batam	Tertaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.500.000.000	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Batam	Tertaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	1.407.411.500	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang tugas pokok dan fungsi	60%		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	Meningkatnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang tugas pokok dan fungsi	60%		
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Batam	Tersedianya fasilitas, sarana dan prasarana perkantoran Pemerintahan Kota Batam	100%	450.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Batam	Tersedianya fasilitas, sarana dan prasarana perkantoran Pemerintahan Kota Batam	100%	1.925.645.000	
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Batam	Tersedianya fasilitas, sarana dan prasarana perkantoran Pemerintahan Kota Batam	100%	300.000.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Batam	Tersedianya fasilitas, sarana dan prasarana perkantoran Pemerintahan Kota Batam	100%	136.801.108	
III	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		Peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal	95%		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		Peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal	95%		
4	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Batam	Meningkatnya kepatuhan terhadap standar dan prosedur pertanggungjawaban keuangan	62%				Meningkatnya kepatuhan terhadap standar dan prosedur pertanggungjawaban keuangan	62%		
4	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Batam	Persentase pelaksanaan pemeriksaan tujuan tertentu	100%	500.000.000	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Batam	LHP Pemeriksaan dengan tujuan tertentu	41 Obrik	118.500.000	
5	Pelaksanaan Reviu di Lingkungan Pemko Batam	Batam	Jumlah pelaksanaan Reviu	6 kali	350.000.000	Pelaksanaan Reviu di Lingkungan Pemko Batam	Batam	Laporan hasil reviu	20 obyek reviu dan 1 laporan reviu LK	186.340.000	
6	Monitoring dan Pemutakhiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan (internal dan eksternal)	Batam	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	100%	400.000.000	Monitoring dan Pemutakhiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan (internal dan eksternal)	Batam	Laporan pemutakhiran data hasil pemeriksaan	60 Obrik	71.140.000	

7	Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Pemko Batam	Batam	Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai dengan PKPT	100%	700.000.000	Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Pemko Batam	Batam	LHP Pengawasan Reguler	60 Obrk	165.920.000
8	Operasional Saber Punggi di lingkungan Pemerintah Kota Batam	Batam	Lporan pelaksanaan saber punggi	1 laporan	550.000.000	Operasional Saber Punggi di lingkungan Pemerintah Kota Batam	Batam	Persentase Sosialisasi saber punggi	100%	372.134.000
9	Evaluasi SAKIP OPD	Batam	Jumlah SAKIP OPD yang dievaluasi	44 OPD	250.000.000	Evaluasi SAKIP OPD	Batam	Evaluasi SAKIP OPD	100%	106.200.000
	Pengembangan dan Pemantapan SAKIP	Batam	Peserta yang menguasai dan mengimplementasikan SAKIP di masing-masing OPD	100%	0,00	Pengembangan dan Pemantapan SAKIP	Batam	Peserta yang menguasai dan mengimplementasikan SAKIP di masing-masing OPD	100%	105.100.000
10	Peningkatan Kapabilitas APiP	Batam	Jumlah pelaporan pelaksanaan keg.kapabilitas APiP	4laporan	500.000.000	Peningkatan Level Kapabilitas APiP	Batam	Laporan pelaksanaan kegiatan kapabilitas APiP	1 Laporan	42.240.000
11	Peningkatan Kompetensi APiP	Batam	Jumlah Bimtek/ Jumlah Diklat	40 Orang	700.000.000	Peningkatan Kompetensi APiP	Batam	Jumlah Bimtek/ Jumlah Diklat	58	873.170.000
12	Monitoring dan Evaluasi SPP	Batam	Jumlah OPD yang dievaluasi maturitas SPP	6 OPD	120.000.000	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi SPP	Batam	Jumlah OPD yang dievaluasi maturitas SPP	6	54.160.000
13	Survei Penilaian Integritas	Batam	Laporan hasil survei	1 laporan	200.000.000	Survei Penilaian Integritas	Batam	Laporan hasil survei	1 laporan	92.685.000
										5.558.346.608

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

Usulan program dan kegiatan tersebut diperoleh berdasarkan masih banyaknya pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik yang dilaksanakan oleh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Namun untuk Tahun Anggaran 2021, tidak ada program dan kegiatan yang berdasarkan usulan dari masyarakat, program dan kegiatan diusulkan.

Tabel T-C.32.

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Kota Batam**

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BATAM

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 terdapat 8 (delapan) uraian perencanaan pengawasan sebagai berikut :

1. Fokus Dan Sasaran Pengawasan Umum;
2. Fokus Dan Sasaran Pengawasan Teknis;
3. Fokus Dan Sasaran Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah;
4. Kinerja Rutin Pengawasan;
5. Pengawasan Prioritas Nasional;
6. Pengawasan Reformasi Birokrasi;
7. Penegakan Integritas;
8. Peningkatan Kapasitas APIP.

Adapun uraian perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Fokus Dan Sasaran Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah
Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah difokuskan kepada:
 - a. Pemeriksaan pengelolaan keuangan dengan sasaran:
 - 1) optimalisasi perencanaan dan penganggaran daerah;
 - 2) pajak dan retribusi daerah;
 - 3) hibah dan bantuan sosial;
 - 4) belanja barang dan jasa;
 - 5) belanja modal; dan
 - 6) saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti.
 - b. Pemeriksaan kebijakan daerah dengan sasaran konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan urusan.
 - c. Pemeriksaan tata laksana, dengan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

d. Pemeriksaan aset, dengan sasaran pengamanan aset yang dikuasai pihak ketiga.

2. Kinerja Rutin Pengawasan

Kegiatan kinerja rutin pengawasan pada daerah provinsi dan kabupaten/kota, meliputi:

- a. reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- b. reviu rencana kerja pemerintah daerah;
- c. reviu rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- d. reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
- e. reviu laporan kinerja;
- f. reviu penyerapan anggaran;
- g. pemeriksaan kinerja perangkat daerah;
- h. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, antara lain:
 - a) pemeriksaan investigatif;
 - b) proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi; dan
 - c) penghitungan kerugian keuangan negara.
- i. pemeriksaan serentak kas opname;
- j. pemeriksaan pajak pusat dan penerimaan negara bukan pajak;
- k. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- l. evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- m. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

3. Pengawasan Prioritas Nasional

Kegiatan pengawasan prioritas nasional, meliputi:

- a. tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
- b. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
- c. penyelenggaraan koordinasi tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah;
- d. evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender);
- e. dana desa: a. daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana desa; dan b. daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dana desa;

- f. bantuan operasional sekolah: a. daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi bantuan operasional sekolah; dan b. daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah.

4. Pengawasan Reformasi Birokrasi

Pengawasan Reformasi dan Birokrasi pada daerah provinsi dan kabupaten/kota, meliputi:

- a. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan pengawasan, meliputi:
 - a) sistem pengendalian intern pemerintah;
 - b) kapabilitas APIP;
 - c) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - d) penilaian internal zona integritas;
 - e) penanganan benturan kepentingan;
 - f) penanganan laporan pengaduan (whistle blower system); dan
 - g) penanganan pengaduan masyarakat.
- c. evaluasi pelayanan publik.

5. Penegakan Integritas

Kegiatan penegakan integritas pada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, meliputi:

- a. survey penilaian integritas;
- b. penanganan laporan gratifikasi;
- c. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi; dan
- d. verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi.

6. Peningkatan Kapasitas APIP

Peningkatan kapasitas APIP, dengan fokus:

- a. pemeriksaan investigatif;
- b. pendampingan pengadaan barang dan jasa;
- c. penerapan sistem manajemen risiko;
- d. pemeriksaan dana alokasi khusus; dan
- e. sertifikasi profesi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat

Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kota Batam merupakan penjabaran lebih teknis dari pernyataan Visi dan Misi. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran dapat menspesifikasi indikasi dari keberhasilan kinerja dimasing-masing tujuan. Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Daerah Kota Batam merumuskan tujuan yang terkait dengan misi, yaitu :

1. Mewujudkan pengendalian Intern Pemerintah yang efektif.
2. Mewujudkan Pelayanan dan penyelesaian atas pengaduan masyarakat
3. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
4. Meningkatkan kepatuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pengawasan Internal.

Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Kota Batam merumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Tujuan : Mewujudkan pengendalian intern pemerintah daerah yang efektif
Sasaran : Meningkatkan kualitas SPIP OPD
Indikator kinerjanya : Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level berkembang.
2. Tujuan : Mewujudkan Pelayanan dan penyelesaian atas pengaduan masyarakat
Sasaran : Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat
Indikator kinerjanya : Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat.
3. Tujuan : Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja OPD
Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD
Indikator kinerjanya : Rata-rata nilai hasil evaluasi SAKIP OPD.
4. Tujuan : Meningkatkan kepatuhan OPD terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Sasaran : Meningkatkan Kepatuhan OPD terhadap peraturan perundang – undangan
Indikator kinerjanya :
 - o Persentase jumlah kegiatan yang tidak ada temuan Material (Keuangan dan Aset)
 - o Persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan (Internal dan Eksternal) yang ditindak lanjuti.

5. Tujuan : Meningkatkan Kualitas Aparat Pengawas Internal masyarakat

Sasaran : 1. Meningkatkan kualitas SDM Inspektorat

Indikator kinerjanya : Persentase Jumlah pegawai yang bersertifikat pendidikan/ pelatihan fungsional dan teknis

2. Peningkatan Kapabilitas Inspektorat

Indikator kinerjanya : Kapabilitas Inspektorat

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Batam yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kota Batam dalam satu tahun mendatang. Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

b. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

a. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi SPIP;

b. Kegiatan Evaluasi SAKIP OPD;

c. Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP;

d. Kegiatan Peningkatan Kompetensi APIP;

e. Kegiatan Monitoring dan Pemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (internal dan Eksternal);

f. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dilingkungan Pemko Batam.;

g. Kegiatan Pelaksanaan Reviu dilingkungan Pemko Batam;

h. Kegiatan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

i. Kegiatan Operasional Saber Pungli di lingkungan Pemerintah Kota Batam;

j. Kegiatan Survei Penilaian Integritas.

		(PKPT)								
10	Pelaksanaan Reviu dilingkungan Pemko Batam	Jumlah Pelaksanaan Reviu	Batam	6	186.340.000	APBD		6	250.000.000	
11	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Persentase pelaksanaan pemeriksaan tujuan tertentu	Batam	100%	118.500.000	APBD		100%	120.000.000	
12	Operasional Saber Pungli di lingkungan Pemerintah Kota Batam	Persentase Sosialisasi saber pungli	Batam	100%	372.134.000	APBD		100%	375.000.000	
13	Survei Penilaian Integritas	Laporan Hasil Survei	Batam	1 laporan	92.685.000	APBD		1 laporan	100.000.000	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BATAM

Rincian kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Inspektorat Daerah Kota Batam tahun 2021 yang pelaksanaan dan pembiayaannya bersumber dari dana APBD Kota Batam dapat dilihat dari tabel berikut:

No	PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA			OPD PELAKSANA / PENANGGUNG JAWAB
				APBD KOTA	APBD PROV	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi			1.407.411.500			INSPEKTORAT
	Honorarium Pegawai Kontrak / Tidak Tetap	Batam	13	38.350.000			
	Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetak Pakai Habis	Batam	1	125.769.500			
	Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis	Batam	1	2.685.000			
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Batam	800	4.500.000			
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Batam	1	2.765.000			
	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	Batam	9144	73.152.000			
	Belanja Rekening Telepon	Batam	12	20.400.000			
	Belanja Jasa Adm Bank, Pajak Bank dan Koreksi Bank	Batam	480	7.200.000			
	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	Batam	12	1.800.000			
	Belanja Pencetakan dan Penjilidan	Batam	1	21.750.000			
	Belanja Sewa Alat Angkut Darat	Batam	1	60.000.000			
	Belanja Sewa Perlengkapan /Peralatan Kantor	Batam	12	20.400.000			
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Luar	1	903.640.000			
	Belanja Pajak Daerah	Batam	1	7.000.000			
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Batam	59	42.185.000			
	Belanja Pakaian Adat Daerah	Batam	59	43.365.000			
	Belanja Pakaian Olahraga	Batam	59	32.450.000			
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			2.062.446.108			
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Batam		1.925.645.000			INSPEKTORAT
	Belanja Alat Listrik Dan Alat Elektronik Pakai	Batam	2	700.000			
	Belanja Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga/Kantor	Batam	100	48.850.000			
	Belanja Barang Pakai Habis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Batam	32	36.920.000			
	Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	Batam	3	777.150.000			
	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	Batam	2	15.000.000			
	Belanja Modal Pengadaan Layar Proyektor	Batam	2	13.700.000			
	Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner	Batam	2	15.000.000			
	Belanja Modal Pengadaan Almari	Batam	1	5.200.000			
	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	Batam	1	5.000.000			
	Belanja Modal Pengadaan Alat/Mesin	Batam	5	20.000.000			
	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	Batam	3	9.600.000			
	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	Batam	17	297.500.000			
	Belanja Modal Pengadaan Printer	Batam	22	133.500.000			
	Belanja Modal Pengadaan Scanner	Batam	6	69.000.000			

No	PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA			OPD PELAKSANA / PENANGGUNG JAWAB
				APBD KOTA	APBD PROV	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	Batam	1	3.250.000			
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	Batam	12	27.000.000			
	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	Batam	4	13.800.000			
	Belanja Modal Pengadaan Camera	Batam	2	92.500.000			
	Belanja Modal Pengadaan Proyektor/Infocus	Batam	1	45.000.000			
	Belanja Modal Pengadaan Microfon	Batam	2	14.400.000			
	Belanja Modal Pengadaan Speaker	Batam	2	18.300.000			
	Belanja Modal Pengadaan Voice Recoder	Batam	2	11.000.000			
	Belanja Modal Pengadaan Telepon	Batam	6	21.125.000			
	Belanja Modal Pengadaan Papan White Board/Papan Pengumuman	Batam	2	5.500.000			
	Belanja Modal Pengadaan Komputer	Batam	3	217.650.000			
	Belanja lisensi windows	Batam	30	9.000.000			
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana			136.801.108			INSPEKTORAT
	Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor	Batam	1	71.381.108			
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Batam	37	25.220.000			
	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	Batam	24	40.200.000			
II	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan			2.088.489.000			
4	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu			118.500.000			INSPEKTORAT
	Honorarium Jasa Narasumber	Batam	1	27.000.000			
	Belanja Pencetakan dan Penjilidan	Batam	288	10.040.000			
	Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan	Batam	180	4.500.000			
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut	Batam	1	76.960.000			
5	Pelaksanaan reviu di lingkungan Pemko Batam			186.340.000			INSPEKTORAT
	Honorarium Jasa Narasumber	Batam	90	81.000.000			
	Belanja Pencetakan dan Penjilidan	Batam	308	24.640.000			
	Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan	Batam	1370	43.350.000			
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Luar Batam	1	37.350.000			
6	Monitoring dan Evaluasi SPIP			54.160.000			INSPEKTORAT
	Honorarium Jasa Narasumber	Batam	36	32.400.000			
	Belanja Pencetakan dan Penjilidan	Batam	70	5.600.000			
	Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan	Batam	608	16.160.000			
7	Monitoring dan Pemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (Internal dan Eksternal)			77.140.000			INSPEKTORAT
	Belanja Pencetakan dan Penjilidan	Batam	1	10.640.000			
	Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan	Batam	1660	38.900.000			
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut	Batam	1	27.600.000			
8	Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Pemko Batam			165.920.000			INSPEKTORAT
	Honorarium Jasa Narasumber	Batam	60	54.000.000			
	Honorarium Jasa Tenaga Ahli	Batam	60	9.400.000			
	Belanja Pencetakan dan Penjilidan	Batam	255	10.100.000			
	Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan	Batam	3478	87.530.000			
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut		1	4.890.000			
9	Operasional Saber Pungli di Lingkungan Pemerintah Kota Batam			372.134.000			INSPEKTORAT
	Honorarium Jasa Narasumber	Batam	36	32.400.000			
	Honorarium Penyelenggara Kegiatan	Batam	12	279.000.000			

No	PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA			OPD PELAKSANA / PENANGGUNG JAWAB
				APBD KOTA	APBD PROV	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetak Pakai Habis	Batam	1	3.974.000			
	Belanja Rekening Telepon	Batam	12	6.000.000			
	Belanja Pencetakan dan Penjilidan	Batam	26	1.760.000			
	Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan	Batam	1680	37.200.000			
	Belanja Pakaian Seragam Saber Pungli	Batam	40	11.800.000			
10	Evaluasi SAKIP OPD			106.200.000			INSPEKTORAT
	Honorarium Jasa Narasumber	Batam	1	51.300.000			
	Belanja Pencetakan dan Penjilidan	Batam	114	6.500.000			
	Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan	Batam	1400	35.000.000			
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Batam	6	13.400.000			
11	Peningkatan Kapabilitas APIP			42.240.000			INSPEKTORAT
	Honorarium Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Pendukung Kegiatan	Batam	2	21.600.000			
	Belanja Pencetakan dan Penjilidan	Batam	80	3.440.000			
	Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan	Batam	240	14.000.000			
	Belanja Akomodasi Hotel Berbintang	Batam	4	3.200.000			
12	Peningkatan Kompetensi APIP			873.170.000			INSPEKTORAT
	Honorarium Jasa Narasumber	Batam	72	64.800.000			
	Uang Saku Peserta	Batam	59	167.000.000			
	Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan	Batam	1416	35.400.000			
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Batam	1	189.800.000			
	Belanja Kontribusi Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Pns	Batam	59	416.170.000			
13	Survei Penilaian Integritas			92.685.000			INSPEKTORAT
	Honorarium Jasa Narasumber	Batam	1	6.500.000			
	Honorarium Penyelenggara Kegiatan	Batam	11	30.250.000			
	Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetak Pakai Habis	Batam	1	1.865.000			
	Belanja Pengiriman Paket Dan Barang Keperluan Kantor	Batam	10	1.000.000			
	Belanja Pencetakan dan Penjilidan	Batam	10	1.000.000			
	Belanja Penggandaan (Fotocopy) Dokumen	Batam	1000	300.000			
	Belanja Sewa Alat Angkut Darat	Batam	40	22.000.000			
	Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan	Batam	150	7.500.000			
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Batam	2	11.600.000			
	Belanja Transportasi Darat		97	10.670.000			
			JUMLAH	5.558.346.608			

TABEL V.1
HASIL PEMETAAN KEGIATAN (BELANJA LANGSUNG) TAHUN 2021 KE DALAM PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019

Nama Perangkat Daerah : INSPEKTORAT DAERAH KOTA BATAM

KODE	RENJA PERANGKAT DAERAH		PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019										KETERANGAN / PERMASALAHAN								
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					KEGIATAN						PROGRAM		URUSAN					
			NOMENKLATUR URUSAN		KODE		NOMENKLATUR URUSAN		KODE		NOMENKLATUR URUSAN			KODE		NOMENKLATUR URUSAN					
1	Belanja Gaji dan Tunjangan (BTL)		X	XX	01	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	X	XX	1	2.02	Administrasi Keuangan	X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	X	XX		
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	X	XX	1	2.03	Administrasi Umum	X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
			X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns													
			X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional													
			X	XX	1	2	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan													
			X	XX	1	2	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor													
			X	XX	1	2	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor													
			X	XX	1	2	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			X	XX	1	2	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			X	XX	1	2	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			X	XX	1	2	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			X	XX	1	2	17	Penyediaan Makanan dan Minuman													
			X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah													
			X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	X	XX	1	2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
			X	XX	1	2	4	Pengadaan Pakaian Korpri													
			X	XX	1	2	5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu													

PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019												
KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			KEGIATAN			PROGRAM			KETERANGAN / PERMASALAHAN
			PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	URUSAN	PROGRAM	URUSAN	URUSAN	URUSAN	URUSAN	
			KODE	NOMENKLATUR URUSAN	KODE	NOMENKLATUR URUSAN	KODE	NOMENKLATUR URUSAN	KODE	NOMENKLATUR URUSAN	KODE	NOMENKLATUR URUSAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	X XX 1 2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	X XX 1 2.03	Administrasi Umum	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
			X XX 1 2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor								
			X XX 1 2	Pengadaan Mebeleur								
			X XX 01 2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional								
			X XX 1 2	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	X XX 1 2.03							
			X XX 1 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor								
			X XX 1 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan								
			X XX 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional								
			X XX 1 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur								
			X XX 1 2	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor								
			X XX 01 2.03 40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional								
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan										6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
		Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Pemko Batam	6 1 2	2.01 1	6 1 2	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6 1	INSPEKTORAT DAERAH	
		Pelaksanaan reviu di lingkungan Pemko Batam	6 1 2	2.01 2								
		Monitoring dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (internal dan eksternal)										
		Monitoring dan Evaluasi SPIP	6 1 2	2.01 4								
		Evaluasi SAKIP OPD	6 1 2	2.01 4								
			6 1 2	2.02 3	6 1 2	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					
		Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	6 1 2	2.02 1	6 1 2	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					
		Peningkatan Kompetensi APIP	6 1 3	2 2	6 1 3	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	6 1 3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,			

KODE	RENJA PERANGKAT DAERAH		PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019										KETERANGAN / PERMASALAHAN	
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		KEGIATAN		PROGRAM		URUSAN		URUSAN			
			NOMENKLATUR URUSAN	KODE	NOMENKLATUR URUSAN	KODE	NOMENKLATUR	KODE	NOMENKLATUR					
										NOMENKLATUR URUSAN		KODE		NOMENKLATUR
		Peningkatan Kapabilitas APB												
		Operasional Satuan Kerja di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	01	03	2.02	02							
		Survei Penilaian Integritas												